



KLIPING

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Sumber Berita: **RADAR TARAKAN**

TANGGAL:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
																v														

BULAN:

JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES
								v			

TAHUN

2015

HALAMAN

8b

Pemkab Lakukan Inventarisasi Aset

Asisten III: Hapus Aset yang Tak layak

TANJUNG SELOR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan hingga saat ini masih terus melakukan inventarisasi aset daerah. Selain untuk terdata dengan baik, pendataan aset ini merupakan salah satu yang ditargetkan tuntas karena hal tersebut akan mempengaruhi penilaian dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk Bulungan mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Asisten III bidang Administrasi, Kornelis Elbaar dengan tegas menyampaikan agar persoalan aset tersebut bisa terselesaikan meskipun tidak dipungkiri masih banyak yang perlu didata.

"Kami sudah berusaha menginventarisir tapi sampai sekarang belum tuntas. Karena memang cukup banyak ada sekitar 400 lebih yang belum ada dokumennya," ujar Kornelis Elbaar.

Dikatakannya, apabila laporan dan kejelasannya sudah ada selanjutnya tinggal disampaikan ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

Dengan data yang ada dalam waktu dekat

pihaknya juga akan meminta bidang aset daerah untuk melakukan penghapusan aset jika memang sudah tidak layak.

"Daripada buang-buang anggaran untuk pemeliharaan lebih baik dihapus saja. Karena anggaran kita tahun ini saja sudah berkurang,"ungkapnya.

Unutk itu, harus ada yang dipangkas dan didata kembali mana yang perlu dan tidak. Dengan begitu apabila data sudah selesai besar harapannya Bulungan bisa mendapat WTP. Diakuinya sejauh ini bagian aset daerah Bulungan juga berupaya terus berbuat dalam menginventarisir.

"Nah mana yang rusak atau tidak layak segera laporkan maka kita hapus, kita lakukan lelang agar tidak

memberatkan daerah. Ini karena bagian aset salah satu hal yang saya urusi. Saya harap dukungan seluruh SKPD dan secepatnya melaporkan,"ucapnya.

Yang terpenting, lanjutnya adalah administrasi dari aset tersebut, karena itu bagian yang menjadi pemeriksaan BPK sehingga harus lengkap datanya.

"Kepala SKPD juga harus bertanggung jawab untuk inventarisir aset ini, Bulungan sebagai Kabupaten tertua harus lebih baik dari yang lainnya di Provinsi Kaltara sebagai Kabupaten induk dan tentunya sebagai contoh,"pungkasnya. (adv*/fit/ian)



Kornelis Elbaar

FITRIAN/RADAR TARAKAN